



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DUMAI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA GUNAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **632641**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.181.889.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 156.740.000
2. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 274.944.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 625 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 109.660.000
4. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 176.673.000
5. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 13.872.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 11368 m2 di KAB / KOTA KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 184.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000



3. MOTOR, KAWASAKI TRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000

4. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 109.831.386

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.696.220.386

III. HUTANG Rp. 176.418.664

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.519.801.722

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.